



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 (LAKIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024**

Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis
Website: www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id
Email: kesbangpolbks@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan fungsinya, rencana strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan. Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bengkalis yang pada akhirnya dapat dijadikan acuan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Meskipun masih terdapat kekurangan, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran berikutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SOFYAN, S.STP, M.PA
PEMUDA UTAMA MUDA
19790816 19802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	1	
BAB I	PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4	
B. Maksud dan Tujuan.....	5	
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	5	
D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	
E. Struktur Organisasi.....	10	
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategi Tahun 2016-2021	13	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	19	
B. Analisis Capaian Kinerja	21	
C. Realisasi Anggaran	34	
D. Analisis Efisiensi	35	
BAB IV	PENUTUP	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ada pun Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis beralamat di Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat

- beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 5 (Lima) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Target
1	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	70%
3	Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	10%

5	Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	BB
---	---	----

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam merealisasikan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menggunakan dana sebesar Rp46.763.144.328,- atau 93,20% dari pagu anggaran sebesar Rp50.173.653.955,- yang bersumber dari DPA Perubahan Tahun 2023.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontingensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Bengkalis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun.

Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Ada pun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kantor Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini tetap harus di tampilkan dan di laporkan untuk dapat digunakan sebagai: 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan perbandingan hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja; 2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol; 3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesbangpol pada tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam

menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
3. Penetapan Kinerja Tahun 2023

D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya mencapai visi misi serta tujuan strategis ditemukan kondisi kecenderungan dan perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa. Permasalahan utama (*strategic issued*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan

1. Perkembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang kehancuran. Banyak kasus-kasus penyimpangan ideologi di Pulau Jawa turut mempengaruhi kondusifitas di Kabupaten Bengkalis. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak- pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah.
4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya kerukunan antar Etnis dan Suku Bangsa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Menyikapi kemungkinan timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Terkontaminasinya pola pikir, sikap dan perilaku generasi muda akibat interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup, kesadaran berpolitik, pelaksanaan hak dan kewajiban serta wawasan kebangsaan.
2. Partisipasi politik masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat

1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah, sehingga kurang mencintai kebudayaan dan seni budaya daerah.
2. Dukungan dari stakeholders dan pemangku kepentingan dalam upaya pembentukan BNN Kabupaten Bengkalis.
3. Koordinasi Tim P4GN Kabupaten Bengkalis, terbit Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

5. Belum optimalnya koordinasi dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Pembinaan kepada Ormas belum optimal berupa peningkatan wawasan organisasi, penempatan program kerja, menumbuhkembangkan kepekaan anggota.
7. Pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan tidak berjalan dengan kontinyu.

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

1. Belum efektivitas penanganan konflik sosial secara terkoordinir dan terpadu dalam melaksanakan rencana aksi daerah.
2. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan tidak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara.
4. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait dengan kegiatan Keintelijenan dalam rangka mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas nasional di daerah. Tindak lanjut dari kondisi ini diberlakukannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat.

E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengoordinasikan kegiatan. Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

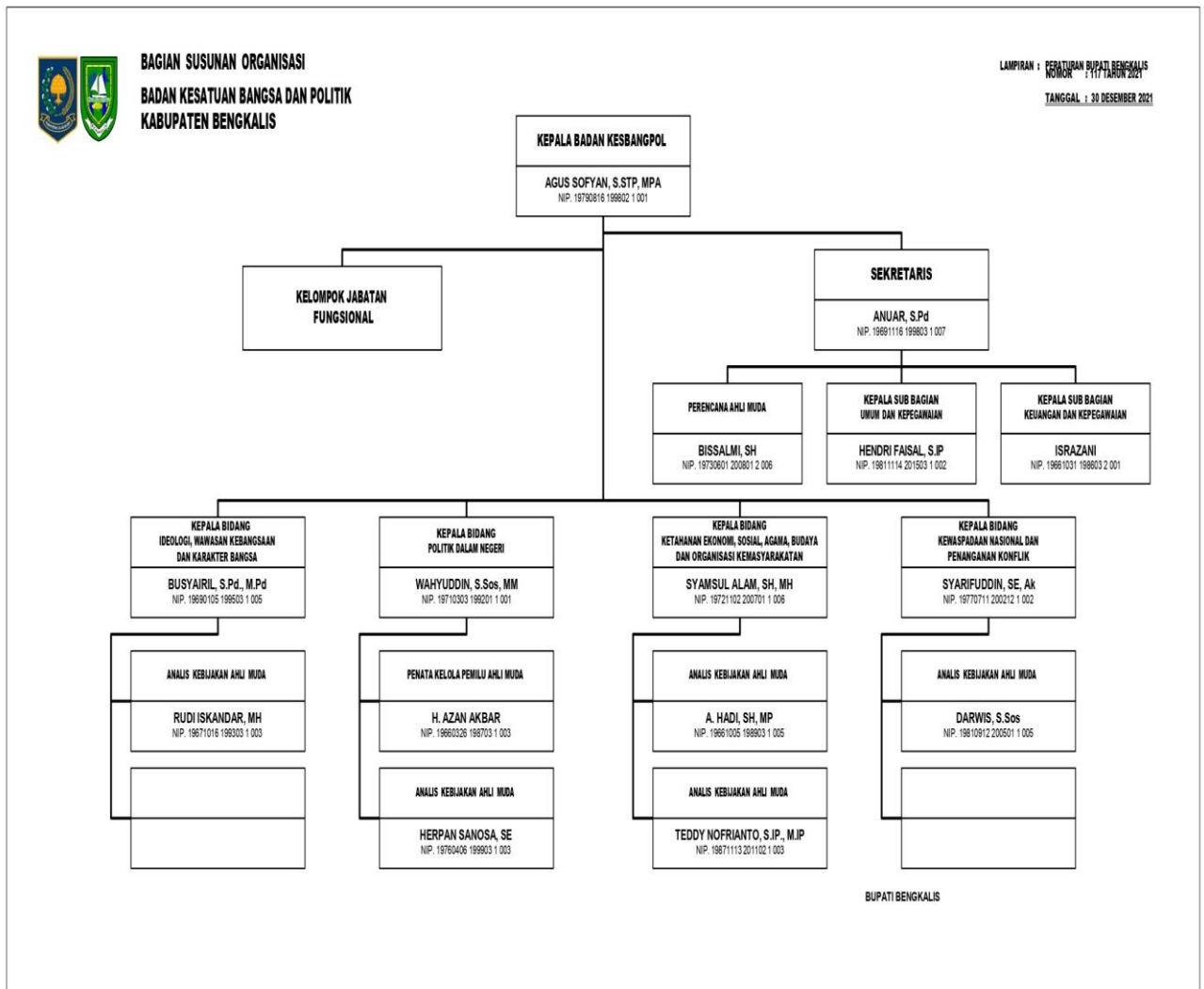
Adapun susunan organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Bidang Politik, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:

- Analis Kebijakan Ahli Muda
- Analis Kebijakan Ahli Muda

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut:



1.1 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek Startegis Organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Efesiensi

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja dapat memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen segenap aparatur dan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis.

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stake holders*.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ditetapkan Misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, yaitu **MISI II “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”.**

c. Tujuan

Sesuai dengan misi diatas maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021–2026 adalah **“Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis”.**

d. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun sasaran dan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang komendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	65%	70%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	0%	10%	10%	10%	10%	10%

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dengan mengambil target awal tahun 2021.

Di samping sasaran Indikator Kinerja diatas, pada Tahun 2022 telah dilakukan perbaikan Sasaran Kinerja berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti berikut ini:

Tabel 2.2
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang komendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	65%	70%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	0%	10%	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	Predikat akuntabilitas kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Ada pun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang disusun adalah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2023. Ada pun Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>		<i>(4)</i>
1.	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 Orang
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	Persentase partisipasi politik masyarakat	70%
3.	Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	1	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	1	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	10%

5.	Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	1	Predikat akuntabilitas kinerja	BB
		2	Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp50.173.653.955.- yang nantinya akan diuraikan melalui analisa berdasarkan capaian sasaran, indikator dan target kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas.

Di dalam bab ini dijelaskan informasi tentang capaian kinerja dari sasaran strategis yang dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023. Target kinerja jangka pendek (tahunan) yaitu sepanjang tahun 2023 yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023. Sebagai dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran, diharapkan juga dapat menjadi umpan balik untuk membantu penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran Kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya perangkat daerah/organisasi yang akuntabel. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, dengan memilih Indikator Kinerja Utama yang dominan. Melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama kinerja diperoleh gambaran bahwa sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Bab ini dijelaskan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang memuat penyebab keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja. Masing masing indikator kinerja utama sudah mempunyai targetnya sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan kegiatan dimasa yang akan datang dengan upaya setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih bernilai efisien dan terukur. Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa	1 Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Orang	100	735	73,5
2	Meningkatnya partisipasi politik	1 Persentase partisipasi politik	Persen	70%	85%	121
3	Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	1 Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	50	50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	1 Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	Persen	10%	65%	65
5	Meningkatnya manajemen akuntabel yang dan berkinerja baik	1 Predikat akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	100
		2 Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100
Rata-Rata (Cukup Berhasil) 50-79						509,5

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada realisasi dan capaian kinerja masing-masing target pada sasaran di atas.

Selanjutnya rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan dalam analisis capaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja atas Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Orang	100	735	73,5

Untuk capaian indikator kinerja pada sasaran strategi kesatu dapat dilihat pada tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Untuk indikator ini realisasi kinerja sebanyak 735 Orang sehingga terdapat capaian kinerja melebihi target 100 Orang menjadi 735 Orang dengan penambahan menjadi 635 Orang/73,5%.

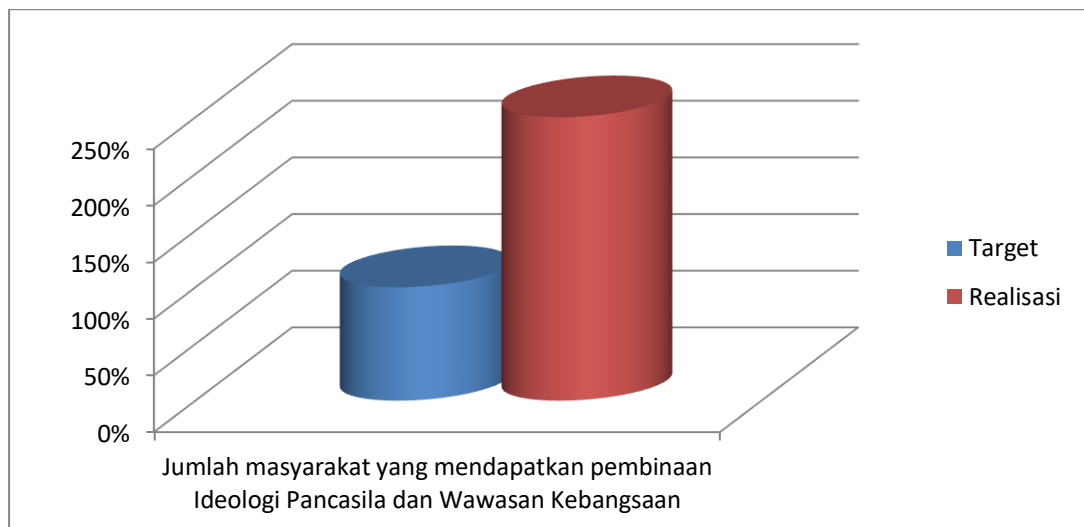
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Orang	100	735	73,5	470	200	150	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2023 dengan target 100 orang dan realisasi 73,5%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mendukung sasaran tersebut adalah: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat; 2. Penyuluhan bela negara kepada tokoh masyarakat, pelajar dan PKK; 3. Penyuluhan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila kepada tokoh masyarakat dan PKK; 4. Rapat dan koordinasi tim GNRM Kabupaten Bengkalis; 5. Pembinaan Paskibraka; 6. Fasilitasi FPK Kabupaten Bengkalis.

Adapun capaian indikator kinerja Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu **Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan** dengan indikator kinerja **Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan** tahun 2023, realisasinya

735 Orang dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Orang atau capaian pada tahun 2023 menunjukkan capaian 73,5%.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

Pada sasaran Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat pada hasil capaiannya. Dapat dilihat realisasi target indikator kinerja ini adalah sangat baik dengan adanya dukungan anggaran, SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Sasaran 2 :

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4

Capaian Target Kinerja atas Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	70	85	121

Untuk capaian indikator kinerja pada sasaran strategi kedua dapat dilihat pada tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase partisipasi politik masyarakat, capaian pada indikator kinerja ini yaitu 85%. Indikator kinerja ini didapat dari pelaksanaan Pendidikan politik kepada masyarakat, pemilih pemula dan PKK, hal ini kami anggap akan berpengaruh dan berkaitan dengan aspek pembinaan politiknya kepada perolehan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden,

DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten Bengkalis serta pemilukada serentak tahun 2024 yang akan datang.

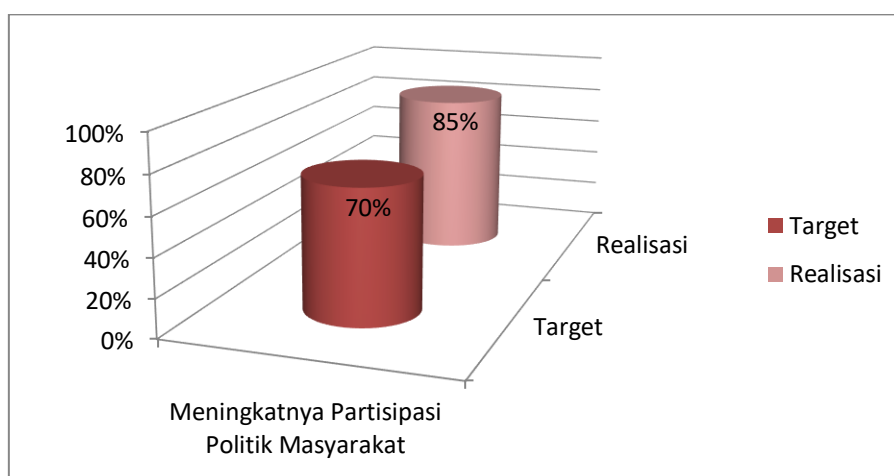
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Partisipasi Politik Masyarakat

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	70	85	121	130	130	143	100	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase partisipasi politik masyarakat pada tahun 2023 dengan target 10% dan realisasi 121%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mendukung sasaran tersebut adalah: 1. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Pemilu kepada masyarakat, Tokoh, Pemilih Pemula dan PKK; 2. Sosialisasi melalui media masa.

Ada pun capaian kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dengan indikator kinerja **Persentase partisipasi politik masyarakat** dengan capaian sebesar 121%, dengan dilakukannya berbagai upaya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan didukung oleh stakeholders serta pemangku kepentingan dan masyarakat serta dukungan anggaran agar meningkatnya pendidikan politik masyarakat. Ada pun upaya tersebut seperti dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui media, baik media elektronik dan publikasi (baliho, spanduk, banner) yang dipasang pada lokasi strategis di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, sebagaimana tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6
Capaian Target Kinerja atas Sasaran 3**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	50	50

Untuk pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada Tabel di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan indikator kinerja Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan, capaiannya yaitu 50%. Target awal sebanyak 100 orang tidak terealisasi karena adanya kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta proyeksi penurunan pendapatan tahun 2023, sehingga kegiatan yang diusulkan pada perubahan

APBD tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu akan berakhirnya tahun anggaran 2023.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Jumlah Pengurus Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah pengurus organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	50	50	60	50	0	60	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengurus organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2023 dengan target 100% dan realisasi 50%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mendukung sasaran tersebut adalah: 1. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Pemilu kepada masyarakat, Tokoh, Pemilih Pemula dan PKK; 2. Sosialisasi melalui media masa.

Ada pun capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan organisasi masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan** dengan indikator kinerja **Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan** terdapat realisasi 50 rang dari target 100 Orang dengan capaian sebesar 50%. Kegiatan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2023 dilakukan langsung di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan beberapa lokasi di Kecamatan di mana terdapat Ormas yang menyampaikan permohonan pendaftaran.

Sasaran 4 :

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8

Capaian Target Kinerja atas Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	Persen	10	107,6	108

Untuk pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada Tabel di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dengan indikator kinerja Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika, capaiannya yaitu 108% dengan artian bahwa pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika telah dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Sehingga diharapkan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dapat mengurangi peredaran narkotika dimaksud.

Tabel 3.9**Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2021-2023
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu**

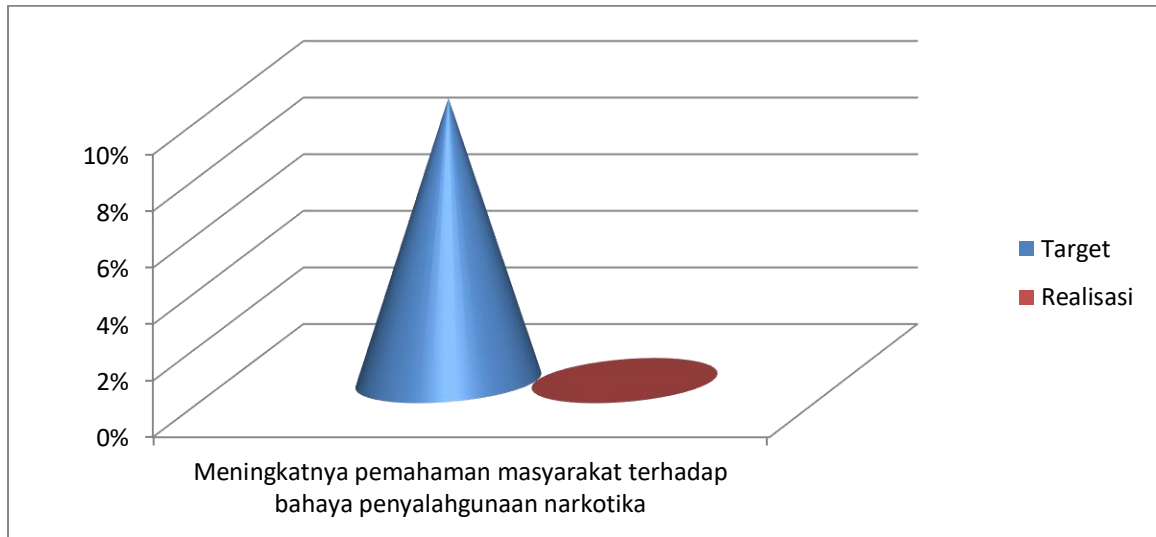
No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2021	1.081	41	1.122
2	2022	1.055	35	1.020
3	2023	1.038	38	1.076

Tabel 3.10**Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Menurunnya
Kasus Penyalahgunaan Narkotika**

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	Persen	10	107,6	108	65	14,2	0	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 dengan target 10% dan realisasi 107,6%. Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu untuk mendukung sasaran tersebut adalah: 1. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada Organisasi kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, Pelajar dan PKK; 2. Sosialisasi melalui media masa.

Ada pun capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan indikator Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba terdapat realisasi sebesar 107,6% dengan capaian sebesar 108%. Hal ini dikarenakan terdapatnya dukungan anggaran dan seluruh stakeholders pada kegiatan yang fokus untuk pembinaan kepada masyarakat dengan artian bahwa pembinaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba telah dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Keseriusan Pemerintah Daerah dan adanya dukungan oleh aparat penegak hukum serta dipertegas lagi dengan adanya pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2022 dan 2023 sehingga sangat membantu suksesnya kegiatan ini ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

Pada sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, capaiannya sudah baik, hal ini dikarenakan Keseriusan Pemerintah Daerah, dukungan oleh aparat penegak hukum dan segenap masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis serta melalui pelaksanaan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti dilakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya peredaran narkoba dan miras dan dukungan FPK, FKDM, FKUB Kabupaten Bengkalis yang langsung

dilaksanakan sampai ke wilayah desa. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mendapatkan pembinaan dan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kembali pada Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2023 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran ini.

Sasaran 5

Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Capaian Target Kinerja atas Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Predikat akuntabilitas kinerja	Persen	BB	BB	100
2. Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

Penjelasan untuk capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis ke 5 adalah sebagai berikut :

IKU 1 Sasaran 5 :
Predikat Akuntabilitas Kinerja

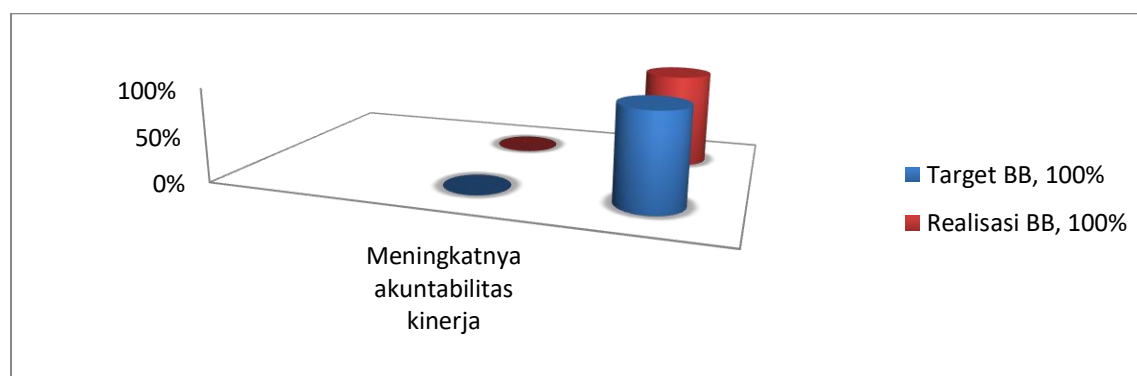
Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 memperoleh predikat BB. Hal ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah mengarah pada perbaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja. Capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Predikat akuntabilitas kinerja	Persen	BB	BB	100	BB	B	B	B	0

Dari tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2019 s.d 2021, sedangkan pada tahun 2018 indikator ini tidak merupakan indikator kinerja. Pada Tahun 2022 dengan target kinerja Predikat BB realisasi BB. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 700.1.2.1/94/ITDA tanggal 5 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, Predikat Akuntabilitas Kinerja adalah **BB** yaitu **Sangat Baik** dengan nilai **72,90**.

Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik realisasi adalah BB dengan capaiannya 100%.

Penjelasan untuk capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke 5 adalah sebagai berikut :

**IKU 2 Sasaran 5 :
Persentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti**

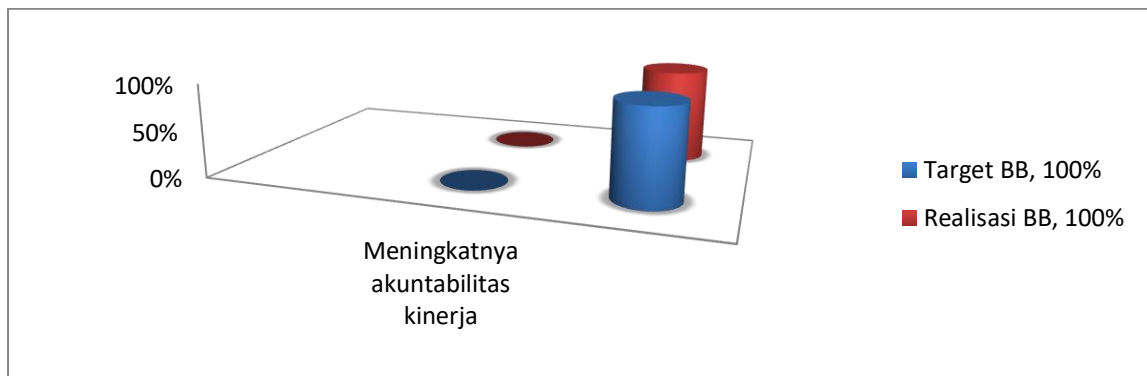
Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan dengan menyampaikan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023. Dalam hal ini audit dilakukan oleh BPK RI dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Tim APIP, dimana laporan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggaran. Hal ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah mengarah pada perbaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja. Capaian indikator ini adalah sbb :

**Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja	Sat	Capaian Tahun 2023			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya				
		Target	Real	Capaian (%)	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Untuk Persentase temuan yang ditindaklanjuti realisasi 100% dengan capaian 100%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Ada pun capaian kinerja sasaran Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

Pada sasaran Meningkatkan manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik, untuk indikator kinerja Predikat akuntabilitas kinerja dengan capaian BB dan Persentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti sudah 100%, hal ini dikarenakan adanya komitmen seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mendukung pemenuhan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama dan upaya meningkatkan kinerja pada sasaran ini.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja pada Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebesar Rp20.059.730.678,- yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp4.930.331.818,-. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.931.894.860,-. Belanja Hibah Rp6.197.504.000,- dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp185.770.000,-. Pada Triwulan ke IV tahun 2023 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp50.173.653.955,- terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp29.928.153.277,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp5.315.564.705,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.031.369.850,-. Belanja Hibah sebesar Rp32.598.350.400 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp228.369.000,- Secara umum realisasi anggaran Program dan Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2023, untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan mencapai 93,20% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup

optimal (s.d Desember). Penyerapan anggaran terbesar terdapat pada Sasaran Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan sebesar 101,9% dari pagu sasaran sebesar Rp2.989.725.100,-. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu 50,06% dari pagu sasaran sebesar Rp1.098.640.000,-. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa	73,5	4.681.739.300	3.469.534.175	71,12
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	121	32.830.407.800	32.299.716.980	68,27
Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	50	2.989.725.100	2.240.776.065	101,9
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	108	1.098.640.000	733.696.099	50,06
Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	100	8.573.141.755	8.019.421.009	98,82

D. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian sasaran kinerja dan realisasi anggaran terhadap masing-masing sasaran, terdapat sasaran yang memang ada efisiensi disamping kendala defisit anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pencairan dana sudah memasuki akhir tahun anggaran 2023 sehingga diperkirakan tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Terhadap hal di atas dilakukan analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa	73,5	71,12	2,38
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	121	68,27	52,7
3.	Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan	50	101,9	51,9
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	108	50,06	57,9
5.	Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik	100	98,82	1,18

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa yang terdiri dari satu Indikator (1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target indikator utama 100 Orang dan Capaian Kinerja 73,5%, Indikator sasaran tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,38% dari realisasi anggaran 71,12% dengan capaian kinerja sasaran 73,5%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari satu Indikator (1) Persentase partisipasi politik masyarakat dengan target indikator utama 70 % dengan capaian kinerja 121%, Indikator tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 52,7% dari realisasi anggaran 68,27% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 121%, Secara umum

tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari satu Indikator (1) Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dari Target Kinerja Utama 100 Orang dan capaian kinerja 50%, Indikator tersebut tingkat efisiensi anggaran sebesar 51,9% dari realisasi anggaran sebesar 101,9% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 50%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari satu Indikator (1) Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba dari Target Kinerja Utama 10% dan capaian kinerja 108%, Indikator ini tingkat efisiensi anggaran sebesar 57,9% dari realisasi anggaran sebesar 50,6% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik yang terdiri dari dua Indikator (1) Predikat akuntabilitas kinerja dari Target Kinerja Utama BB dan capaian kinerja 100%, (2) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dari Target Kinerja Utama 100% dan capaian kinerja 100%, Indikator ini tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,18% dari realisasi anggaran sebesar 98,82% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan kedua indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan secara optimal, apabila dilihat dari rata-rata capaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis terutama dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kelemahan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2023. Capaian strategis tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), dari ke-6 (enam) indikator untuk semua indikator telah berhasil memenuhi target capaian sasaran kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran strategis "Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan" dengan Indikator:
 - a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target 100 Orang realisasi 735 Orang dengan capaian kinerja 73,5%
2. Sasaran strategis "Meningkatnya partisipasi politik masyarakat" dengan indikator:
 - a. Persentase partisipasi politik masyarakat target 70% realisasi 85 dengan capaian kinerja 121%.
3. Sasaran strategis "Meningkatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan" dengan indikator:

- a. Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan Target 100 Orang realisasi 50 Orang dengan capaian kinerja 50%.
4. Sasaran strategis "Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba" dengan indikator:
 - a. Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba dengan Target 10% realisasi 107,6% dengan capaian kinerja 108%.
5. Sasaran strategis "Meningkatnya manajemen yang akuntabel dan berkinerja baik " dengan indikator:
 - a. Predikat akuntabilitas kinerja dengan Target BB realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
 - b. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan Target 100% realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 capaian keseluruhan rata-rata sebesar **509,5%**.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja pada Badan Kesbang dan Politik antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran ASN Badan Kesbang dan Politik yang berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang sebelumnya telah ditentukan. Namun demikian untuk tahun 2023, Badan Kesbang dan Politik tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis perlu dukungan dan komitmen secara aktif semua pihak sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai bukti nyata komitmen penerima amanah bukan hanya menjadi wacana dan polemik pemikiran semata-mata.

2. Optimalisasi mekanisme internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diharapkan permasalahan yang muncul dapat diminimalisir agar tidak mempengaruhi realisasi maupun capaian indikator kinerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas Program dan kegiatan khususnya dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
5. Dilakukan upaya-upaya guna mengantisipasi hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain:
 - a). Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - b). Komitmen dari pejabat yang telah mengikat diri dalam Perjanjian Kinerja bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk benar-benar mengimplementasikan indikator program dan sasaran kegiatan masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan.
 - c). Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
 - d). Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

- e). Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.